

ERAU: RITUAL POLITIK DAN KEKUASAAN

Erau: Political and Ritual Power

M. Yamin Sani*

*Fakultas Sospol Universitas Hasanuddin
Fak. Sospol Unhas, Jl. Perintis Kemerdekaan
E-mail: yamin_sani@gmail.com

Koreksi naskah I tanggal 5 Agustus 2012. Koreksi naskah II tanggal 12 Agustus 2012. Finalisasi Naskah 9 Oktober 2012

Abstrak

Erau adalah sebuah peristiwa budaya yang telah dilakukan sejak masa Kerajaan Kutai Kartanegara pada abad ke xiii, sampai sekarang. Erau masih tetap eksis karena kuatnya relasi antara tradisi budaya, praktik dan kekuasaan. Dalam arti, bahwa Erau merefleksikan dimensi politik, dan karena itu menjadi instrumen kekuasaan. Tulisan ini, adalah bagian dari hasil penelitian berjudul Erau, Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik Orang Kutai yang bertujuan untuk menganalisis (1) Erau pada masa Kerajaan Kutai Kartanegara, (2) Erau, masa pasca Kerajaan Kutai Kartanegara dan (3) Erau pasca Otonomi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan, Erau yang diselenggarakan pada masa Kerajaan Kutai telah mengalami transformasi makna simbolik atau transformasi struktural. Hal ini tampak pada beberapa bagian upacara yang bertahan sehingga memperlihatkan kontinuitas, tetapi pada bagian lain, proses upacara telah mengalami dinamika dan bahkan perubahan. Namun satu hal yang bertahan, bahwa Erau tetap menjadi instrumen kekuasaan.

Kata Kunci: *Erau: Ritual Politik dan Kekuasaan*

Abstract

Erau is a cultural event that has been done since the Kutai kingdom in the 13th century, until now. Erau still exist because of the strong relationship between cultural traditions, practices and power. In a sense, that Erau reflect the political dimension, and therefore becomes an instrument of power. This paper is a part of the results of a study entitled Erau, Political Culture and Ethnic Identity Kutai people who aimed to analyze (1) Erau in the Kutai Kingdom, (2) Erau, the post Kutai kingdom and (3) post Erau Autonomy. The results showed, Erau held in the Kingdom of Kutai has transformed the symbolic meaning or structure transformations. This is evident in some parts of the ceremony that showed kontingutas survive, but on the other, the ceremony has undergone dynamics and even change. But one last thing, that Erau remains an instrument of power.

Keywords: *Erau: Ritual Politics and Power*

PENDAHULUAN

Tradisi upacara, baik berkenaan dengan daur kehidupan (*rites de passage*), upacara gangguan, sesungguhnya merefleksikan bentuk kontraksi masyarakat yang memiliki arti demikian penting bagi kehidupan komunitasnya. Tradisi upacara tersebut dilakukan atas dasar adanya kesadaran yang mendalam tentang kehidupan mitis, berkenaan dengan asal asul, dan kejayaan pelaku budaya masa lalu yang terangkai rapi dalam mitologi. Tradisi upacara karenanya merefleksikan kesadaran, bahwa manusia sebagai makhluk hidup, memiliki keterbatasan dalam menyikapi dan memahami dimensi makrokosmos.

Mitos pada masyarakat tradisional, diyakini sebagai sesuatu yang sakral, apalagi cerita dalam mitos dianggap sebagai *hierofani*. Malinowski; bahkan mengklaim bahwa mitos adalah cerita yang mempunyai fungsi sosial. Suatu mitos, menurutnya, adalah suatu cerita tentang masa lampau yang berfungsi sebagai piagam untuk masa kini. Tentunya cerita itu menjalankan fungsi menjastifikasi beberapa pranata yang ada di masa kini sehingga dapat mempertahankan keberadaan pranata tersebut¹. Mitos juga merupakan cerita yang berisi pesan moral yang memenangkan kebaikan atas kejahanatan. Karena itu, pada masyarakat tertentu, mitos adalah peristiwa masa lalu yang dianggap betul-betul terjadi. Hal ini menunjukkan mitos, upacara dan simbol, menjadi isu menarik, karena pada

¹ Peter Burke. 2003. *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

masyarakat tradisional, daur kehidupan sangat diwamai oleh upacara yang memiliki makna simbolik sehingga tetap fungsional dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, bukan tidak mungkin upacara tradisional memiliki arti demikian penting dan menjadi identitas kelompok etnis tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Giddens, tradisi adalah medium identitas yang mengasumsikan makna, tetapi identitas juga mengasumsikan proses konstan dari rekapitulasi dan reinterpretasi. Identitas adalah penciptaan konstansi dalam perjalanan waktu, yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Karena itu pemeliharaan identitas sosial merupakan persyaratan utama keamanan ontologis.²

Pentingnya sebuah tradisi upacara menyebabkan peristiwa ini selalu diperintangi secara teratur pada setiap waktu. Hal ini terjadi karena berbagai konsepsi tentang "sebuah tradisi", memiliki makna-makna tertentu. Dari perspektif antropologi, tradisi dapat diartikan secara diakronik maupun sinkronik.³ Dalam hubungan ini, tradisi dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang secara estafet dijemput dan kemudian dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Jika arti nilai-nilai masa lalu yang diterima untuk diberikan sebagaimana adanya tanpa terjadi perubahan.⁴

Sebenarnya, tradisi dapat dipahami sebagai jalan bagi masyarakat untuk merumuskan dan menanggapi persoalan dasarnya, maka tradisi seharusnya bersifat luwes dan cair sehingga sebuah tradisi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang secara terus menerus mengikuti zaman. Ini juga berarti, tradisi tidak bersifat absolut, tetapi selalu situasional.

Giddens menyatakan, tradisi terkait dengan memori, terutama apa yang disebut dengan memori kolektif, tradisi melibatkan ritual, berkait dengan apa yang disebut gagasan kebenaran formulatif. Tradisi pun memiliki penjaga dengan kekuatan pengikat yang merupakan kombinasi moral dan emosi. Memori seperti tradisi, mengorganisasi masa lalu dalam kaitannya dengan masa sekarang. Dalam tatanan Post-Tradicional, bahkan dalam masyarakat sekarang yang paling modern, tradisi tidak sepenuhnya menghilang, sehingga dalam beberapa hal dan dalam beberapa

konteks, tradisi tetap berkembang.⁵ Bahkan menurut Handler dan Linnekin yang dikutip oleh Robert E. Wood bahwa tradisi selalu dibangun secara simbolik pada masa sekarang, bukannya "sesuatu" yang diturunkan dari masa lalu.⁶ Definisi tentang apa yang tradisional dalam kebudayaan, spesifikasi kaitan-kaitan antara masa sekarang yang ditemukan dan masa lalu yang dibayangkan. Tidak ada sesuatu yang objektif dan terbatas yang bisa kita identifikasi sebagai "kebudayaan tradisional" yang terhadapnya orang bisa mengukur dan menilai perubahannya, didefinisikan sebagai kebudayaan tradisional, baik untuk masa lalu maupun masa sekarang, terus-menerus dirumuskan kembali.

Pemikiran Bourdieu (dalam Alam, 1999) tentang "praksis" menggambarkan hal yang sama, bahwa tradisi sebagai simbol-simbol yang terkandung dalam suatu kebudayaan senantiasa bersifat cair, dinamis dan sementara karena kebudayaan tergantung pada praksis para pelakunya yang berada pada konteks sosial tertentu. Kebudayaan dalam arti ini, bukan semata-mata merupakan sekumpulan pengetahuan yang diwariskan atau dilestarikan, melainkan merupakan sesuatu yang dibentuk dalam suatu konstruksi sosial yang berkaitan erat dengan kepentingan maupun kekuasaan si pelaku. Selanjutnya, dikatakan, bahwa Gramci mengkritisi fenomena sosial di atas melalui konsep hegemoni, yang dipahami sebagai tatanan ide dan moral yang dapat menarik kesepakatan aktif (*active concert*) dari kelas-kelas sosial yang didominasinya. Dengan kata lain, konsep hegemoni ini menolak adanya manifestasi langsung kepentingan-kepentingan ekonomi kelas penguasa di dalam kehidupan politik maupun kebudayaan masyarakat bersangkutan.

Aspek modernisasi yang lebih menekankan pada dinamika perubahan, suatu tradisi harus mampu memposisikan dan menampakkan fungsinya sebagai unsur penyeimbang yang memungkinkan perubahan tidak menjadi salah arah sehingga merusak struktur. Dalam hubungan ini, tradisi tidak relevan untuk dipertentangkan dengan modernisasi.

Dalam hubungan inilah, penulis mencoba mengkritisi *Erau*, sebuah tradisi upacara yang diadakan

² Anthony Giddens. 2003. *Masyarakat Post-Tradicional*. Yogyakarta: IRCISOD

³ P.M. Laksono. 1985. *Tradisi Dalam Struktur Masyarakat Jawa Kerajaan dan Pedesaan Alih-Ubah Model Berpikir Jawa*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,

⁴ P.M. Laksono.

⁵ Giddens. *op.cit*

⁶ Lihat Yekti Maunati. 2004. *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKis

pada setiap tahun di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. *Erau* berasal dari bahasa daerah Kutai dari kata "eroh", yang berarti ramai, ribut, riuh dalam suasana yang penuh suka cita. Semasa Kutai masih berbentuk kerajaan, maka pada setiap tahun diadakan upacara *Erau*, yang bertujuan untuk memelas (*tempong tawar*) tanah, hutan dan air. Menurut kepercayaan pada waktu itu, upacara ini akan dapat memberikan kemakmuran dan kebahagiaan kepada mereka. Melalui *Erau* maka sawah dan ladang, sungai dan hutan-hutan akan menjadi subur dan akan memberikan penghasilan yang berlimpah.⁷ Bahkan lebih jauh dari itu, *Erau* mempunyai arti simbolik dan filosofis yang melambangkan budayatradisional, yakni *Erau* sebagai tanda syukur, keselamatan, ketentraman, kemakmuran, keadilan sosial, pembersihan jiwa dan persatuan.

Pada masa Kerajaan Kutai Kartanegara, *Erau* adalah sebuah peristiwa budaya yang diselenggarakan setiap tahun oleh bangsawan Kutai atau kerabat raja yang memerintah dan mendapat dukungan secara luas oleh masyarakat. Hai ini menyebabkan *Erau* sebagaimana namanya, selalu diselenggarakan secara meriah. Dalam pemahaman orang Kutai, kemerahan upacara, akan membawa keagungan dan kejayaan kerabat raja. Namun demikian upacara *Erau* harus tetap diselenggarakan secara khidmat, bahkan pada beberapa bagian upacara tetap bersifat sakral. Hal ini dapat dimengerti karena *Erau* dibingkai dalam suatu sistem kepercayaan dan mitos, khususnya yang terkait dengan asal-usul dan kebesaran bangsawan Kutai. Pada masa pasta kerajaan, kemudian pada era otonomi daerah, *Erau* mengalami perubahan struktur dan fungsi upacara. Walaupun prosesi upacara tetap diperlakukan. *Erau* sebagai sebuah praksis para pelakunya yang berada pada konteks sosial tertentu memiliki kepentingan tertentu pula. Dalam hubungan ini, proses otonomi daerah, *Erau* merupakan ritual politik yang terkait dengan kekuasaan.

Birokrasi Kesultanan Pada Masa Kerajaan

Birokrasi kesultanan pada masa kerajaan, ditandai oleh dominasi struktur pemerintahan pusat yang dipimpin sendiri oleh Sultan. Agar pemerintahan berjalan efektif, Sultan dibantu oleh mangkubumi, majelis orang-orang bijaksana dan menteri. Di bawah menteri ada hulubalang/senopati yang membawahi *lasykar* yang bertugas menjaga keamanan.

Sultan Kutai Kartanegara juga menempatkan *Ponggawa* yang memimpin pemerintahan dalam wilayah yang lebih kecil semacam distrik. Para *Ponggawa* membawahi kepala-kepala kampung (*petinggi*) yang memerintah dalam wilayah masing-masing. Namun demikian, pada masing-masing kampung juga diangkat kepala adat yang akan mengurus masalah adat-istiadat.

Lembaga-lembaga birokrasi kesultanan dibentuk agar pemerintahan berjalan efektif. Namun demikian, kekuasaan yang dapat dijalankan oleh masing-masing lembaga sangat terbatas. Ini disebabkan secara formal kekuasaan yang ada pada birokrasi kesultanan terfokus pada diri sang raja. Hai ini diperkuat oleh sebuah Undang-Undang Dasar yang disebut *Panji Selaten*, dan sebuah kitab peraturan yang dikenal sebagai *Undang-Undang Braja Niti*.

Sebagai Undang-Undang Dasar Kerajaan Kutai Kartanegara, *Panji Selaten* tampak sangat sederhana, tetapi telah berfungsi menjadi sumber hukum tertulis yang mengatur tata kehidupan raja dan aparat kerajaan, serta kewajiban dan hak warga kerajaan.

Raja adalah figur sentral yang memiliki hak-hak prerogatif dalam menetapkan sesuatu keputusan. Raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kerajaan dan memangku kerajaan tersebut secara turun-temurun. Kekuasaan yang dipangku secara turun-temurun didasarkan pada kepercayaan, bahwa raja memiliki "kharisma" dan kemampuan untuk menjejaherakan rakyatnya. Kharisma dipahami oleh Weber dalam Burke sebagai mutu tertentu yang melekat pada kepribadian seseorang yang menyebabkan ia dianggap sangat luar biasa dan diperlakukan oleh seseorang yang dikaruniai kekuatan supranatural (gaib), seorang manusia super yang setidak-tidaknya mempunyai kekuatan atau kualitas sangat istimewa. Dengan demikian, syarat utama menjadi raja adalah faktor "keturunan".⁸

Jabatan di bawah raja adalah "Mangkubumi" yang biasanya dijabat oleh figur senior yang memiliki pengetahuan dan wawasan berkenaan dengan masalah kemasyarakatan dan pemerintahan kerajaan, tetapi yang lebih penting mengkubumi haruslah orang yang mampu menjaga martabat keluarga kerajaan. Hal ini penting karena mangkubumi, secara otomatis dipercayakan untuk menjalankan roda pemerintahan

⁷ Anwar Soetoen.. 1999. *Kulai Perbendaharaan Kebudayaan Kalimantan Timur*, Pemda Kabupaten Kutai Kaltim.

⁸ Peter Burke. 2003, *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.,

kerajaan dalam keadaan darurat, khususnya ketika kerajaan mengalami kefakuman, atau karena usia putra mahkota masih tergolong di bawah umur. Hal ini menyebabkan seorang Mangkubumi adalah seorang bangsawan yang biasanya memiliki hubungan kerabat dekat dengan raja.

Dalam struktur pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara juga terdapat anggota *Majelis Orang-orang Bijaksana* yang terdiri dari tokoh kaum bangsawan, tetapi dapat pula dari golongan masyarakat menengah (bergelar *Awang*) yang memahami dengan baik seluk-beluk adat-istiadat orang Kutai. Hal ini penting, karena berdasarkan mufakat dan atas persetujuan raja majelis menetapkan peraturan atau hukum yang berlaku di seluruh kerajaan. Peraturan yang dibuat oleh Majelis dikategorikan sebagai adat yang diadatkan.

Menteri adalah pejabat pembantu raja yang dipercayakan menangani masalah-masalah tertentu dalam kerajaan. Mereka juga menjadi mediator antara raja, mangkubumi dengan rakyat, ponggawa dan petinggi lainnya dalam wilayah kerajaan.

Dalam Undang-Undang Dasar Panji Selatan dijelaskan tugas-tugas menteri sebagai berikut : (1) menteri bertugas melaksanakan perintah raja dan mangkubumi, (2) wajib memberikan nasihat kepada raja pada waktu-waktu raja menjalankan tugasnya melaksanakan hukum adat, (3) bersama-sama dengan senopati dan ponggawa menjaga agar hukum dan adat tetap berjalan sebagai pegangan bagi pemerintah kerajaan, (4) dalam melaksanakan tugas-tugasnya, menteri harus berlaku adil. (5) melaksanakan hukum penting bagi para hulubalang (senopati) yang melakukan penghematan terhadap kerajaan. Bersama-sama dengan raja dan orang-orang besar lainnya wajib menyelenggarakan kesejahteraan rakyat seluruhnya demi kebesaran dan kejayaan kerajaan dan dapat menyangga atau mendaulat rajanya yang zalim atau berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

Jabatan lain yang cukup bergengsi dalam struktur pemerintahan kerajaan Kutai Kartanegara adalah *Hulubalang*, yakni jabatan dalam kerajaan berkenaan dengan keamanan, baik terhadap diri raja maupun kerajaan. Tugas hulubalang dalam kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura termaktub pada pasal 21 Undang-Undang Dasar Panji Selaten sebagai berikut:

- (1) Menjunjung perintah raja sehingga menjamin terciptanya keamanan kerajaan (2) Menjadi aparat yang mampu menegakkan peraturan, hukum dan

adat, (3) bertugas menjaga kerajaan dari ancaman dan serbuan musuh dari luar, (4) melaksanakan perintah raja dan mangkubumi, dan mentaati segala adat yang diadatkan.

Struktur pemerintahan yang ditempatkan pada beberapa wilayah dalam kerajaan Kutai Kartanegara disebut *Ponggawa*. Seorang Ponggawa adalah seorang kepala wilayah yang membawahi beberapa kampung. Tugas Ponggawa, ikut menjaga *keten-traman* dan menegakkan hukum adat. Kedudukan Ponggawa berada di bawah menteri. Namun demikian mereka adalah orang-orang pilihan, karena mereka yang diangkat menjadi Ponggawa adalah orang-orang yang dianggap berjasa pada kerajaan. Sedangkan struktur pemerintahan di bawah Ponggawa adalah *Petinggi* (*Kepala Kampung*)

Petinggi (*Kepala Kampung*) adalah kepala wilayah paling kecil yang membantu raja dalam menjalankan pemerintahan kerajaan. Karena itu, kepala kampung merupakan jabatan paling rendah dalam struktur pemerintahan kerajaan. Namun demikian, jabatan ini tidak kurang penting, karena menjadi perpanjangan tangan raja di setiap kampung. Kerajaan sangat dipengaruhi oleh kinerja petinggi tersebut. Karena itu, mereka yang bersyarat menjadi Kepala Kampung adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, memiliki loyalitas dan berjasa pada kerajaan.

Sebaliknya Kepala Kampung berperan menjadi mediator antar rakyat dengan raja Kutai Kartanegara. Terutama berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya penting untuk disampaikan kepada raja. Disini kepala kampung sebagai bawahan, berupaya menyampaikannya kepada raja dalam bahasa dan tata cara yang lazim. Demikian pentingnya peranan kepala kampung, maka raja merasa berkewajiban untuk memberikan penghargaan secara khusus, dengan memberi gelar-gelar tertentu, terutama pada penyelenggaraan upacara *Erau*,

Sifat pemerintah Kerajaan Kutai Kartanegara yang telah memiliki konstitusi, dapat dikatakan suatu kemajuan yang cukup pesat pada masanya, mengingat beberapa kerajaan lokal pada waktu itu belum memiliki konstitusi. *Panji Selaten* sebagai sebuah konstitusi memang masih sangat bersahaja, karena belum memuat tentang hak-hak dan kewajiban raja maupun aparat kerajaan, demikian juga halnya dengan hak dan kewajiban rakyat. Namun demikian, *Panji Selaten* sudah cukup memadai untuk digunakan dalam

menyelenggarakan pemerintahan kerajaan sejak dibuatnya Undang-Undang Dasar tersebut pada masa Aji Pangeran Simun Panji Mandapa (1635 - 1650), sampai dengan hapusnya kerajaan Kutai Kartanegara padatahun 1960.

Dalam Undang-Undang Kerajaan tersebut, kekuasaan dalam kerajaan Kutai Kartanegara berada di tangan raja, yang secara turun temurun, sehingga hanya keturunan rajalah yang harus memegang tampuk pemerintahan kerajaan Kutai Kartanegara. Dasar kekuasaan tersebut, didasari pada keyakinan, bahwa raja adalah orang yang berasal dari keturunan dunia atas, sehingga memiliki pamor, kekuatan dan kemampuan untuk memerintah, dan karena itu pula raja adalah orang yang suci sehingga dapat menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Karena itulah lidah raja adalah adat yang harus dipatuhi.

Kekuasaan raja sesungguhnya bukan tak terbatas, karena ada "*majelis orang-orang arif bijaksana*" yang berfungsi untuk mengontrol tindakan raja. Masalahnya, anggota majelis orang-orang arif bijaksana tersebut, adalah kerabat dekat raja, dan diangkat oleh raja sehingga mereka sebenarnya dituntut untuk loyal dan setia kepada raja. Sudah tentu ini dikhawatirkan, majelis tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana seharusnya sebagai lembaga yang dapat menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol.

Dalam kondisi seperti ini, tampaknya kekuasaan raja demikian dominan. Bahkan dalam Panji Selaten ditegaskan, raja Kutai Kartanegara sebagai penguasa tunggal atas dusun, kampung, negeri dan Teluk Rantau. Dengan kata lain, raja sudah dikukuhkan sebagai penguasa tunggal atas wilayah kerajaan.

Sebenarnya birokrasi kesultanan sebagai sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki konstitusi, baru terbentuk pada masa pemerintahan Aji Pangeran Simun Panji Mandapa yang memerintah antara tahun 1605 - 1635, bahkan dapat dikatakan masa pemerintahan Aji Pangeran Simun Panji Mandapa inilah menjadi tank tolak bagi pertumbuhan kerajaan Kutai Kartanegara.

Pada masa pemerintahan beliau itu pula, tercatat sebuah peristiwa amat penting, dengan takluknya kerajaan Kutai Mulawarman kepada kerajaan Kutai Kartanegara, sehingga citra Kutai Kartanegara sebagai kerajaan bestir semakin diakui.

Aji Pangeran Simun Panji Mandapa, adalah cucu Raja Mahkota, raja yang menerima pertama kali agama

Islam di kerajaan Kutai dari dua orang muballig, yaitu Dato Ri Bandang dan Dato Ri Tiro Tunggang Parangan yang sebelumnya menyertakan agama Islam di Sulawesi Selatan. Tidak mengherankan jika pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura dijalankan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat yang dituangkan dalam Panji Selaten.

Dalam pasal 1 dikemukakan:

"Yang bernama kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura ialah yang Braja, Bermenteri, berorang besar, berhulubalang, berhukum dengan adatnya, bersyak Islam dengan alim ulamanya". Yang berpongawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bermenteri dan teluk rantaunya berpaling angkatan perbalanya.

Terlihat pada diri Aji Pangeran Simun Panji Mandapa sifat-sifatnya yang ambisius yang dibuktikan dengan merebut wilayah kerajaan Kutai Mulawarman. Bahkan kemudian sang raja mengembangkan upaya-upaya untuk mempertahankan dominasinya melalui rekayasa ideologi kerajaan, yang terutama disosialisasi melalui *Erau*.

Kitab Undang-Undang Dasar *Panji Selaten*, sesungguhnya merefleksikan sebuah sentralisasi politik kerajaan dengan "sistem nilai pusat" masyarakat dan sistem kelembagaan pusat yang disahkan oleh sistem nilai itu. Disebut pusat karena hubungan dekatnya dengan apa yang diyakini masyarakat sebagai sakral; dan dikatakan pusat karena didukung oleh pejabat-pejabat yang berkuasa dalam masyarakat. Geertz melihat fenomena kerajaan-kerajaan lokal seperti ini, menyebutnya sebagai sifat ekspresif, dimana pusat sebagai teladan, yaitu ide-ide bahwa raja dan keratonnya otomatis merupakan suatu mikrokosmos dari tatanan supranatural, dan penjelmaan fisik suatu tatanan politik.

Dilihat dari perspektif teori praksis Upacara *Erau* dengan kerajaan memiliki hubungan dialektis antara subjek dan struktur objektif. Dalam hal ini *Erau* sebagai peristiwa budaya, berfungsi menjadi wahana dalam birokrasi kesultanan, terutama dalam penyelenggaraan komunikasi politik, sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, maupun dalam membangun solidaritas. Momentum ini dimanfaatkan oleh Sultan dengan cara mengumpulkan para pejabat kerajaan di Kotaraja Tenggarong, dirnana pada kesempatan itu, Sultan memberikan pengarahan dan bahkan penghargaan bagi mereka yang berjasa pada kerajaan. Pejabat-pejabat kerajaan dengan sendirinya akan tetap

loyal dan setia pada raja sehingga ideologi kerajaan Kutai Kartanegara, tetap berakar kuat dalam masyarakat kerajaan.

Rahui Rahayu adalah ideologi kerajaan, yang merefleksikan kehidupan yang aman kemakmuran dan sejahtera dimana rakyat kerajaan hidup tenteram dengan sendi-sendi keagamaan yang menjadi acuan dalam membangun kekuasaan. Ideologi inilah menuntut pejabat kerajaan untuk tetap berpegang pada sendi-sendi ketaatan, loyalitas melalui religiusitas sebagai dasar keyakinan bagi birokrasi kesultanan.

Rahui Rahayu sesungguhnya dapat dipahami sebagai sebuah politik kebudayaan dari suatu kelas sosial untuk mempertahankan dominasinya dari kelas sosial yang didominasinya. Kajian budaya Gramci memahami hal ini sebagai sebuah hegemoni. Menurut Barker (konsep ini menyatakan bahwa ada suatu blok historis dari faksi kelas penguasa yang menerapkan otoritas sosial dan kepemimpinan terhadap kelas-kelas subordinat dengan cara merebut persetujuan. Dalam hegemoni terjadi proses-proses penciptaan makna yang digunakan untuk melahirkan dan mempertahankan repersentasi dan praktik-praktik yang dominan atau otoritatif.⁹

Menurut John Storey, hegemoni digunakan dengan mengacu pada sebuah kondisi, dimana kelas dominan tidak hanya mengatur, tetapi juga mengarahkan masyarakat melalui pemakaian kepemimpinan moral dan intelektual. Hegemoni terjadi pada suatu masyarakat dimana terdapat tingkat konsensus yang tinggi dengan ukuran stabilitas yang besar di mana kelas bawah dengan aktif mendukung dan menerima nilai-nilai, ide, tujuan dan makna budaya yang mengikat dan menyatukan mereka pada struktur kekuasaan yang ada.¹⁰ Dalam hal ini, *Erau* dapat dipahami sebagai instrumen kekuasaan, karena dapat direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan penguasa menurut Paul Robinow dan Bourdieu dalam P. Burke, 2003 melihat fenomena seperti ini sebagai sebuah kekerasan simbolis.¹¹ Dalam anti pemberlakuan budaya kelas penguasa atas kelompok yang dikuasai, dan memaksa kelompok yang dikuasai agar mengakui kesahihan budaya kelas penguasa. Masih menurut Bourdieau yang dikutip Don Miller dan J. Branson dalam Diane J. Austin - Broos, bahwa sebagai instrumen kekuasaan,

ia dibentuk oleh sistem ideologi yang diproduksi dalam upaya melegitimasi struktur kelas sosial.¹²

Studi antropologi di sini menuju langsung kepada isu-isu tentang uraian inti berkenaan dengan norma-norma, institusi, ideologi, pengetahuan dan kekuasaan, retorika dan wacana, makna dan interpretasi, serta global dan lokal.

Simbol-simbol keagamaan, keadilan dan kesejateraan dari ideologi kerajaan menjadi daya perekat yang luar biasa bagi Sultan dengan rakyatnya, sehingga pada saat berlangsungnya penyelenggaraan *Erau*, rakyat dari seluruh penjuru kerajaan berdyun-dyun ke Kotaraja Tenggarong untuk ikut berperan aktif pada upacara *Erau* tersebut. Kepemimpinan yang kharismatik Sultan Kutai ini pula, *Erau* dapat berlangsung meriah. Akibat tipe kepemimpinan yang kharismatik itu, menyebabkan kekuasaan yang dimiliki Sultan bersifat absolut. Namun demikian, sultan tidak dapat berbuat sewenang-wenang, karena dibatasi oleh aturan-aturan adat dan nilai ritual. Jika ini dilanggar, maka kerajaan akan mengalami ketidakseimbangan; yang dapat menyebabkan kerajaan mengalami "chaos". Sistem kepercayaan akan hal-hal mitis seperti ini pula, menyebabkan singgasana kerajaan tidak mendapat ronongan, dan situasi kerajaan tetap terkendali.

Paham ini sebenarnya menjastifikasi perilaku Sultan, bahwa apapun yang diperintahkan oleh sultan, wajib untuk dipatuhi, karena titah dan perintah sultan adalah benar. Sultan adalah orang yang berdarah biru, keturunan para dewa yang mendapat mandat untuk memerintah, sehingga perintahnya harus dipatuhi.

Menurut Claessen, pendapat-pendapat tentang hubungan antara manusia dengan kekuatan supranatural, sering tersimpan dalam bentuk mitos. Mitos-mitos itu ditemukan di mana-mana, juga dalam masyarakat Kristiani, sebagaimana mitos yang mengesahkan kedudukan sakral raja-raja Perancis pada abad pertengahan. Pemberton mengakui konsep kekuasaan jawa, tidak dapat meninggalkan unsur-unsur kosmis. Sehingga di Yogyakarta pun terdapat mitologi Ratu Kidul yang melegitimasi kekuasaan Panembahan Senopati.

Dalam kerajaan Kutai Kartanegara semua orang termasuk para pejabat apalagi rakyatnya, harus tunduk

⁹Chris Barker 2005. *Cultural Studies Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Bentang.

¹⁰ John Storey, 2003. *Teori Budaya dan Budaya Pop Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*, Yogyakarta:Kalam

¹¹ Burke, *Op cit*

¹²Diane J . Austin-Bross (Ed.)1987. Australia Pty Lt : *Creating Culture*, Allen & Unwin.

pada Sultan. Kepatuhan pada Sultan bukan saja karena takut, tetapi juga karena malu. Karena itu para pejabat menghindari teguran sultan, karena jika mengalami teguran, maka harga diri sang pejabat akan menjadi cacat.

Terlihat disini betapa besar pengaruh Sultan dalam birokrasinya, sehingga dengan pengaruh itu, para pejabat birokrasi lokal sangat mementingkan ritual *{Erau}* yang harus dilaksanakan, mengedepankan etika dalam menjalankantugas, disertai motivasi dan disiplin kerja yang tinggi. Pengabaian terhadap titah raja, hanya akan menyebabkan kesulitan bagi birokrat lokal. Demikian pula, melalui birokrasi lokal, pengaruh Sultan kepada rakyatnya di daerah dapat berjalan efektif melalui para pejabat di masing-masing daerah yang secara estafet disosialisasikan kepada masyarakat yang memang sangat menghargai Sultan.

Sebenarnya kepatuhan birokrasi lokal terhadap Sultan sebagai pemegang mandat dan memimpin tertinggi pemerintahan kerajaan Kutai Kartanegara, tidak semata-mata karena didasari bahwa seorang adalah keturunan dewa yang berdarah biru, tetapi juga karena ada lain. Pola rekrutmen kepegawaian dalam lingkungan kerajaan Kutai Kartanegara, yang memberi prioritas bagi mereka yang berasal dari kalangan masyarakat strata alias yang bergelar "*Aji*" dan mereka yang berasal dari strata sosial menengah yang bergelar "*Awang*" atau "*Encik*", sebenarnya menjadi upaya agar loyalitas kepada raja tetap terjaga sehingga pemerintahan kerajaan tetap berkesinambungan.

Lagi pula dalam rangka penerimaan pegawai, birokrasi kesultanan tidak pernah mengadakan pengumuman penerimaan pegawai, baik tertulis maupun lisan secara terbuka. Dengan demikian, formasi kepegawaian didasarkan pada kebutuhan dan anggaran belanja pemerintah kerajaan yang tersedia. Ini menyebabkan penerimaan pegawai dilakukan secara tertutup, bahkan biasanya pelamar diantar sendiri oleh keluarga mereka. Jika pelamar berasal dari lapisan masyarakat menengah atas, peluang untuk diterima menjadi pegawai sangat terbuka, apalagi jika dua dasar pokok; ada formasi kepegawaian dan anggaran belanja memungkinkan, pada prinsipnya Sultan setuju. Sebaliknya, jika formasi kepegawaian dan anggaran belanja pemerintah tidak mengizinkan, calon (pelamar) yang berasal dari lapisan masyarakat menengah-atas itu akan diterima melalui proses "*magang*", yakni orang yang dipekerjakan di kantor untuk membantu soal-soal kedinasan dan pendidikan praktis berkenaan dengan tatakrama kesultanan, maupun pengetahuan birokrasi kesultanan.

Birokrasi kesultanan yang dijalankan seperti di atas, jelas sarat dengan nuansa nepotisme, karena sistem pengangkatan seperti ini tidak lagi berdasarkan standar obyektivitas prestasi individu, melainkan didasarkan pada hubungan keluarga antara sesama bangsawan. Namun demikian, hal ini logis saja karena latar belakang rekrutmen seperti ini, sebenarnya bertujuan untuk memperkuat kedudukan Sultan, sehingga keluarga Sultan yang diterima sebagai pegawai akan dituntut loyalitas dantanggungjawabnya sebagai pembantu Sultan.

Birokrasi kesultanan Kutai Kartanegara, sangat dipengaruhi oleh politik kekerabatan yang berbasis pada nilai-nilai budaya kesukuan (*tribal-culture based society*). Dalam hal ini pola hubungan sangat didasarkan pada kesatuan garis keturunan. Demikian pula formasi sosial dan aliansi politik yang terbentuk, juga bertumpu pada pertalian hubungan darah dan perkawinan.

Struktur politik kekerabatan tersebut sangat tertutup tetapi padu, dimana unsur-unsur penunjang, seperti keluarga atau kerabat dituntut saling mendukung dan menunjukkan loyalitasnya kepada Raja atau Sultan tanpa pamrih. Cara ini sangat efektif untuk mempertahankan struktur, karena pihak kerajaan, juga memberi penghargaan kepada mereka, berupa kenakan pangkat, gap atau penghargaan lain yang memberi kepuasan tersendiri bagi oknum tertentu. Di sini pemegang otoritas tunggal, menjadi tumpuan kepemimpinan, yakni diri Sultan yang menjadi titik pusaran dan menjadi mata rantai penghubung elemen-elemen dalam struktur politik kekerabatan. Tradisi politik seperti ini diperlukan guna memelihara keteraturan dan keselarasan sosial yang memang sangat diperlukan dalam menjaga sistem pemerintahan kerajaan.

Birokrasi kesultanan Kutai yang telah berjalan selama ratusan tahun berkat dukungan struktur politik kekerabatan sebenarnya memberi pelajaran berharga dalam sistem pemerintahan saat ini.

- a. Penanaman ideologi pembangunan yang dipahami bersama oleh para birokrasi lokal, memudahkan berlangsungnya proses sosialisasi ideologi tersebut terhadap masyarakat, secara lebih efektif, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap elit birokrasi sehingga menjadi mantap.
- b. Pola rekrutmen yang nepotisme, tidak membangun suasana demokratisasi yang diperlukan oleh sebuah negara bangsa yang mengembangkan pemerintahan yang berkeadilan. Namun demikian, mekanisme dalam menanamkan loyalitas para

pejabat terhadap kepemimpinan Sultan, agaknya perlu ditiru. Hanya dengan loyalitas yang cukup tinggi para birokrasi lokal, memungkinkan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

- c. *Erau* sebagai sebuah peristiwa budaya, tidak sekedar berdimensi *sosio-religio magic*, tetapi juga memiliki relasi dengan kekuasaan, ini disebabkan dalam *Erau* terjadi kontrak sosio-ekonomi dan kontrak politik yang tidak raja bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan Sultan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap diri Sultan sebagai pemimpin yang kharismatik.

ERAU : RITUAL POLITIK DAN KEKUASAAN

Era reformasi yang terjadi sejak tahun 1998, membuka katup ruang politik secara lebih luas, sehingga menyentak kesadaran masyarakat terhadap pentingnya usaha pemaknaan kembali konsepsi hubungan negara dengan masyarakat dalam konteks demokratisasi serta restrukturisasi kehidupan politik dan ekonomi. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan desentralisasi kewenangan pemerintah, khususnya berkenaan dengan pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22/1999 yang kemudian direvisi dalam Undang-Undang No. 33/2004 tentang pemerintahan daerah. Demikian pula dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah.

Ada kesan bahwa *Erau* yang diselenggarakan secara meriah menjadi momentum bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten untuk menyambut pemberlakuan Otonomi Daerah. Lagi pula, melalui Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara lebih leluasa berdasarkan aspirasi dan kemampuan pemerintah di daerah. Apalagi, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam, terutama minyak dan gas bumi, serta batu bara, mendapat kucuran dana yang sangat besar dari pemerintah pusat. Kucuran dana yang trilyunan rupiah itulah memungkinkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan *Erau* secara besar-besaran. Pendapat-pendapat tentang *Erau*, baik dari kalangan birokrasi, maupun dari kalangan masyarakat, khususnya dari kalangan aktivis LSM, sebenarnya memberi dukungan bagi penyelenggaraan *Erau*.

Bagaimanapun *Erau* menjadi penting bagi elit lokal, baik di Tenggarong, Samarinda maupun orang Kutai di Jakarta yang berminat menjadi penguasa nomor satu di Kabupaten terkaya, Kutai Kartanegara. Sebaliknya elit birokrasi yang sementara ini berkuasa sudah barang tentu berupaya mempertahankan kekuasaan, dan agaknya, *Erau* merupakan salah satu pintu masuk dalam mempertahankan kekuasaan tersebut.

Sebenarnya, dalam otonomi daerah peran Sultan dan kerabat dekatnya dalam penyelenggaraan *Erau* relatif terbatas. Hal ini disebabkan, penyandang dana utama dari penyelenggaraan *Erau*, adalah pemerintah kabupaten, sehingga Bupati Kutai Kartanegara Syaukani sangat menentukan. Karena itu, pada penyelenggaraan *Erau* tahun 2001. Syaukani bahkan menggagas dan berhasil mensponsori sebuah ritual penobatan Aji Sultan Salehuddin II sebagai Sultan Kutai. Padahal, Sultan Kutai yang terakhir yang tercatat dalam sejarah, adalah Sultan Aji Muhammad Parekesit, tetapi Syaukani menggagas untuk menghidupkan kembali roh kejayaan Kerajaan Kutai Kartanegara, dan agaknya rakyat juga setuju, walaupun dalam arti simbolik untuk tujuan pengembangan budaya dan pariwisata, maka terjadilah ritual penobatan Sultan Kutai tersebut.

Sebaliknya, Syaukani beserta istri juga memperoleh pemberian gelar bangsawan dari Sultan. Ini kemudian menjadikan Syaukani menjadi tokoh yang demikian populer di Kabupaten Kutai Kartanegara. Boleh jadi sebagai bupati, Syaukani juga menyadari akan peran Sultan Salehuddin II sebagai tokoh pemersatu di kalangan keluarga bangsawan yang sedikit banyaknya masih memiliki pengaruh terhadap orang Kutai. Karena itu disadari,- bahwa jalannya pemerintahan maupun pembangunan sebaiknya mendapat dukungan dari Sultan. Namun demikian, kepemimpinan Syaukani, agaknya bukan tanpa sorotan.

Pembangunan yang terpusat di Kota Kabupaten (Tenggarong) menjadi isu sentral sorotan tokoh-tokoh masyarakat Kutai di wilayah pantai. Mega Proyek Pembangunan Wisata Pulau Kumala yang menelan biaya triliyunan, dianggap sebagai proyek mercusuar yang tidak banyak manfaatnya bagi masyarakat akar rumput yang tinggal jauh dari kota Tenggarong. Bahkan Proyek Gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai) dengan program dua miliar per desa, dianggap sebagai' program akal-akalan pemerintah kabupaten, karena hasilnya tidak sebanding dengan jumlah dana yang dialokasikan pada program

tersebut. Timbul kekhawatiran dana-dana pembangunan tersebut disalahgunakan, melalui trik-trik *mark-up* dan ketidakjelasan pengalokasian dana. Padahal dana yang dihambur-hamburkan itu, sebagian besar berasal dari perut bumi daerah pantai.

Pembangunan mega proyek wisata Pulau Kumala, agaknya menjadi salah satu sorotan masyarakat di wilayah Kecamatan Pantai. Ini disebabkan manfaat secara langsung dari fasilitas tersebut tidak mereka rasakan. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini, yaitu. (1) kebutuhan akan rekreasi bagi masyarakat pedesaan, relatif belum menjadi prioritas, dan (2) letak kota Tenggarong relatif lebih jauh dibandingkan dengan Samarinda, kota propinsi yang lebih ramai dan juga memiliki tempat rekreasi yang cukup memadai.

Kawasan Kutai yang sebagian besar memiliki garis pantai berbatasan dengan selat Makassar merupakan daerah penghasil minyak dan gas terbesar di Kalimantan Timur. Di kawasan itu, beroperasi perusahaan-perusahaan pertambangan minyak asing, antara lain Total Fina ELF, Vico dan United Oil California (Unocal). Di kawasan ini juga memiliki kandungan batubara yang sangat besar, sementara di Delta Mahakam telah berkembang puluhan ribu hektar tambak udang. Belum lagi potensi tambang batubara yang cukup besar, menjadi andalan meraup devisa di masa depan. Tidak mengherankan jika daerah ini memberi kontribusi yang cukup besar dari total anggaran Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 1,7 triliun tahun 2001, sedang pada tahun 2006, total anggaran kabupaten tersebut mencapai 3,7 triliun.

Awal tahun 2002, sempat terpampang spanduk besar maupun poster dan stiker tertempel di dinding-dinding dan pintu rumah penduduk di Kecamatan Samboja dan Muarajawa. Intinya mereka menuntut pembentukan Kabupaten baru, yakni Kutai Pantai. Bahkan sepanjang tahun itu, sejumlah tokoh masyarakat di keempat Kecamatan Pantai, berusaha menggalang massa, dan berkali-kali melakukan aksi unjuk rasa, termasuk perang pernyataan di media lokal. Bahkan untuk mencapai tujuannya, mereka secara sepikah mendeklarasikan berdirinya Kabupaten Kutai Pantai.

Masalahnya bahwa, ketika Kabupaten Kutai yang wilayahnya begitu luas dimekarkan menjadi empat kabupaten/kota (Kutai Barat, Kutai Timur, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara) tahun 1999, justru tokoh-tokoh masyarakat di keempat

kecamatan pantai tersebut tidak memberikan reaksi. Baru ketika Otonomi Daerah dilaksanakan, dan daerah penghasil minyak/gas mendapat dana bagi hasil yang melimpah, mereka kemudian tersentak untuk menghidupkan kembali tuntutan membentuk Kabupaten Kutai Pantai. Tuntutan ini menjadi masalah karena tidak disetujui DPRD setempat.

Menjadi jelas bahwa wacana pembentukan Kabupaten Kutai Pantai muncul sebagai bias pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan ketika upacara *Erau* diselenggarakan secara meriah, ada golongan masyarakat yang menyikapi dengan sinis karena terkesan adanya pemborosan anggaran, sementara rakyat di kecamatan-kecamatan hulu dan pantai, masih banyak yang tergolong miskin. Tampaknya, tanpa disadari telah terjadi pengulangan sejarah, karena salah satu faktor yang menyebabkan kejatuhan Raja Kutai Kartanegara pada masa lalu adalah kebiasaan keluarga raja hidup bermewah-mewah di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan rakyat akibat penjajahan.

Menyimak dinamika politik lokal belakangan ini, tidak terlepas dari imbas euforia otonomi daerah yang dimaknai secara berlebihan, sehingga memunculkan elit-elit lokal yang seakan berlomba untuk membangun kekuasaan politik menjadi cara-caranya boleh jadi tidak elegan. Sementara elit lokal yang berkuasa akan berupaya untuk membangun kekuasaan : mempertahankan atau mengupayakan sukses terhadap kroni, sehingga benturan maupun konflik sering tidak terhindarkan, walaupun sifatnya masih laten.

Dinamika politik lokal dalam bentuk konflik sosial, dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dari gambaran paling nyata dari partisipasi politik masyarakat lokal di daerah-daerah. Menurut Yuwanto (dalam konflik politik lokal merupakan implikasi bagian sekaligus ekses) pemberlakuan kebijakan desentralisasi di dalam bentuk penyelenggaraan otonomi daerah secara luas dewasa ini.¹³

Paling tidak ada tiga faktor yang menjadi penyebab, yaitu: (1) terjadinya pergeseran pusat-pusat kekuasaan di aras lokal, (2) semakin kuatnya kontrol masyarakat terhadap kebijakan dan jalannya pemerintahan, termasuk kontrol terhadap implementasi pembangunan, dan (3) bertumbuh kembangnya institusi lokal yang berorientasi pada penguatan masyarakat sipil (*civil society*).

¹³ Yuwanto, 2003. Dinamika Politik Lokal, dalam *Otonomi Daerah Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal*. Semarang: Puskodak Undip:

Ada tiga bentuk organisasi sosial yang menjadi penanda kebangkitan masyarakat sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu (1) Organisasi kepemudaan (OKP), (2) Organisasi sosial termasuk dalam bentuk yayasan, dan (3) Organisasi kemasyarakatan. Ketiga bentuk organisasi ini, menjadi mitra pemerintah kabupaten dalam menjalankan pemerintahan.

Elit birokrasi, dimanapun, jumlahnya relatif terbatas, tetapi memiliki sumber-sumber kekuasaan. Walaupun jumlahnya relatif terbatas, mereka memiliki pengaruh besar dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik. Elit birokrasi ini, memiliki kesamaan nilai dan berusaha memelihara tersebut untuk mempertahankan kekuasaannya. Konsekuensinya, intrik-intrik politik biasa terjadi. Apalagi gaung reformasi berhasil membangun kesadaran terhadap kelompok-kelompok masyarakat akan hak-hak politik mereka sehingga memunculkan faksionalisme dalam masyarakat lokal. Mereka kemudian berupaya membangun basis relasi politik terhadap pihak-pihak tertentu, termasuk relasi politik kepada birokrasi lokal yang berkuasa. Kegagalan dalam relasi politik, termasuk dalam hal pembagian sumber-sumber material dapat memicu terjadinya konflik.

Suhu politik di Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menghangat menjelang diadakannya pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung, sebagaimana diamanahkan oleh UU No. 34/2004. Pada kesempatan ini, Syaukani HR dan Syamsuri Aspar, kembali dicalonkan oleh Partai Golkar sebagai bupati Kutai Kartanegara untuk kedua kalinya. Calon ini cukup kuat, bukan saja karena mantan pejabat bupati dan wakil bupati yang cukup popular, tetapi juga karena Syaukani dinilai oleh banyak orang sebagai pejabat yang elegant flamboyan, tetapi merakyat. Dengan demikian, walaupun beliau bukan asli putra daerah Kutai, tetapi dia dikenal sebagai broker budaya yang gigih mengembangkan kebudayaan Kutai, termasuk menyelenggarakan *Erau* secara meriah.

Syaukani lebih dikenal sebagai tokoh Bugis Makassar, tetapi isterinya masih berdarah bangsawan Kutai, sehingga posisi Syaukani dalam masyarakat tergolong kuat. Hal ini menyebabkan Syaukani banyak didukung oleh beberapa golongan masyarakat, dari masyarakat akar rumput, sampai kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dari beragam kelompok etnis. Namun demikian, dua paguyuban yang sangat terkenal di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) dan PDKI (Persekutuan Dayak Kalimantan Timur), secara

terang-terangan memberi dukungan kepada pasangan Syaukani - Syamsuri Aspar.

H. Ali Sofyan Alex calon Bupati lainnya, adalah putra asli daerah yang berdarah bangsawan keraton, yang sudah barang tentu berharap mendapat dukungan para keluarga bangsawan Kutai. Dengan demikian, secara tidak langsung, dalam PILKADA 2005, terjadi persaingan ketat antara tokoh yang menonjolkan kharisma keluarga bangsawan KUTAI yang putra daerah dengan tokoh elegant yang merakyat, tetapi bukan asli putra daerah.

Posisi Sultan Kutai dalam PILKADA 2005 menjadi dilematis, karena di satu sisi Sultan sebenarnya tidak meragukan komitmen Syaukani dalam melestarikan budaya Kutai, termasuk secara rutin menyelenggarakan *Erau* setiap tahun. Komitmen tersebut bahkan diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran untuk keperluan kerabat keraton, bahkan sebuah "*kedaton*" pun yang bernilai milyaran rupiah telah dibangun, sebagai simbol kejayaan Kutai Kartanegara. Namun demikian, agaknya semua ini belum cukup meyakinkan pihak kerabat Kesultanan Kutai untuk mengembalikan fungsi politik yang telah hilang pada bangsawan keraton. Bahkan ada kerabat keraton yang meyakini, bahwa Sultan masih memiliki pengaruh dalam mengakomodasi kepentingan rakyat, sehingga, jika kerabat Sultan dapat terpilih menjadi bupati, ini berarti kepentingan keraton akan memperoleh prioritas, terutama dalam hubungannya dengan pelestarian budaya dan pembangunan. Karena itu H. Ali Sofyan Alex yang mencalonkan diri dalam PILKADA Kabupaten Kutai Kartanegara, banyak disambut di kalangan kerabat atau para bangsawan Kutai.

Dalam perkembangannya, ketika masyarakat sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalami penguatan, justru ada kekhawatiran sistem monarki atau sistem masyarakat yang feodalistik akan kembali. Padahal pihak keraton, telah menegaskan, tidak akan mungkin ada sistem feodalistik dalam negara demokrasi, sehingga masyarakat tidak perlu ragu pada komitmen kerabat keraton untuk menjadikan Kutai Kartanegara sebagai daerah yang maju.

Boleh jadi masyarakat masih trauma pada masa lalu, ketika rakyat mendambakan kebebasan dan belenggu penjajahan, tetapi di sisi lain, pemerintahan swapraja, dalam hal ini pihak kerajaan, masih melakukan kerjasama dengan NICA dan hidup mewah. Hal ini disebabkan pihak swapraja-swapraja di Kalimantan masih terikat kontrak politik dengan

pemerintah Hindia Belanda, sehingga pihak Belanda tetap memiliki pengaruh kepada swapraja-swapraja tersebut. Pengaruh pemerintahan Belanda tersalur melalui sebuah dewan yang disebut "Dewan Kutai" yang anggotanya adalah wakil-wakil rakyat yang berfungsi memberi nasehat kepada raja. Masalahnya, bahwa anggota "Dewan Kutai" bukan unsur partai politik, sehingga perannya diragukan untuk menjadi alat kontrol pemerintahan swapraja.

Boleh jadi masyarakat Kutai belajar dari sejarah, sehingga memilih seorang pemimpin yang lebih egaliter dan merakyat. Faktanya, ketika PILKADA berlangsung, Syaukani-Syamsuri sukar terbendung, sehingga sebagaimana diperkirakan banyak pengamat, calon yang diusung oleh Partai Golkar ini memenangkan PILKADA di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ketika Syaukani - Syamsuri memenangkan PILKADA pertama di Indonesia, terbersit ada kekecewaan terhadap kerabat keraton. Boleh jadi karena itu. *Erau* untuk beberapa tahun kemudian (2004 - 2005) tidak terselenggara, karena pemerintah kabupaten tidak bersedia menjadi penyandang dana. Sementara itu, pihak keraton tidak mampu untuk menyelenggarakan pesta budaya tersebut, karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Tampaknya, kemenangan Syaukani - Syamsuri. bukan lagi ditentukan apakah mereka putra daerah atau bukan, tetapi lebih ditentukan oleh popularitas figur dan kepemimpinan yang boleh jadi sebagian besar rakyat Kutai menganggapnya berhasil.

Harus diakui, selama pemberlakuan Otonomi Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Tenggarong, mengalami kemajuan yang cukup dahsyat, sehingga ada suara-suara yang mengatakan, Tenggarong pada malam hari seolah sebuah metropoli tan di tengah kesenyanan malam. Saat ini, "Tenggarong telah menjelma menjadi kota penuh pesona; metropoli baru di Kalimantan. Golden Gate Kartanegara dan Pulau Wisata Kumala perlambang kemegahan menyongsong masa depan". Boleh jadi pendapat ini benar, jika ukuran metropolitan diukur dari gemerlapnya cahaya malam hari yang bersumber dari jembatan "Golden Gate" Kartanegara, Pulau Wisata Kumala, Hotel Singgasana dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara yang megah. Selebihnya, suasana di kawasan ini terasa sunyi, apalagi menjelang larut malam.

Golkar yang mengusung Syaukani HR sebagai pemenang "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung" kembali memerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara lima tahun ke depan. Ini berarti; kebijakan-kebijakan pembangunan, termasuk penyelenggaraan *Erau* akan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini sebenarnya sudah terlihat, dimana dalam tahun 2004 - 2006, *Erau* tidak diselenggarakan. Namun demikian, jika kita mencermati prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang antara lain mengupayakan "Penyediaan infrastruktur dan pengembangan pariwisata daerah", agaknya upacara *Erau* tetap akan dipertahankan. Ini disebabkan upacara *Erau* telah masuk dalam kalender wisata nasional, dan menjadi "*trade mark kutaiF*" sehingga momentum tersebut harus dijaga baik-baik dalam rangka pengembangan wisata daerah.

Majalah berita REFORMASI Edisi No. 49/2006 memberitakan, bahwa Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. H. Syaukani, HR, MM., akan mendorong kembali dilaksanakannya pesta *adat Erau*. Hal ini dikemukakan oleh orang nomor satu di Kutai Kartanegara pada deklarasi dan Sempekat Pore Masyarakat Mat Kutai.¹⁴ Karena itu, saat ini warga Kutai memiliki sebuah organisasi bernama Sempekat Keroan Kutai (SK2) yang ditepungtawari sendiri oleh Sultan Kutai Kartanegara H. Aji Mohammad Salehuddin II sebagai restu dalam menjalankan roda organisasi tersebut. Diharapkan SK2 ini dapat memecahkan kebekuan hubungan antara elit birokrasi lokal, terutama Bupati Kutai Kartanegara Syaukani, HR dengan pihak Kesultanan Kutai Kartanegara.

Rencana penyelenggaraan *Erau* setelah dua tahun tidak dilaksanakan menurut seorang pengurus Lembaga Pembinaan Kebudayaan Kutai (SB) karena:

Bupati Syaukani, walaupun kecewa terhadap pihak keraton sebagai akibat peristiwa Pilkada lalu, tetapi beliau tidak mau larut, sehingga mau mengakomodasi kembali kepentingan pihak Kesultanan. *Erau* dapat menjadi sarana pemersatu kembali antara pihak pemerintah dengan kesultanan, dan diharapkan rasa permusuhan jika memang ada, dapat cair dalam tradisi *Erau*.

Sempekat Keroan Kutai, merupakan organisasi yang berafiliasi terhadap pengembangan budaya. Sifatnya lebih terbuka, akomodatif bagi penautan hak-

¹⁴ Seperti diketahui, pada tahun 2004 pesta adat *Erau* sedianya dilaksanakan pada pekan terakhir Desember. Akibat krisis politik di Kutai Kartanegara pasca lengsernya H. Syaukani HR dan Syamsuri Aspar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, pesta adat tersebut dibatalkan. Diharapkan pihak kesultanan melaksanakan sendiri pada saat tersebut dengan memilih sponsor sendiri, tetapi ternyata berat bagi Kesultanan menggelar *Erau* tanpa dukungan penuh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

hak budaya masyarakat Kutai. Ini juga berarti, bahwa SK2 didirikan untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menciptakan masyarakat madani yang multi kulturalistis. Karena itu, penyelenggaraan *Erau* pun nantinya dapat lebih merakyat. Dalam arti komponen-komponen masyarakat dalam penyelenggaraan *Erau* tersebut berasal dari berbagai wilayah, dan dari berbagai tataran masyarakat. Ketika Bupati kembali terpilih yang tidak lain adalah putri Syaukani HR, yakni Rita Widyasari, penyelenggaraan *Erau* ternyata berlangsung kembali pada setiap tahun. Kemeriahannya tidak kalah ketika *Erau* diselenggarakan pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya. Satu yang hai yang terbaca, *Erau* tetap fungsional sebagai simbol budaya, sekaligus sebagai instrumen kekuasaan.

PENUTUP

Erau sebagai upacara tradisional, merefleksikan banyak hai tentang masyarakat dan kebudayaan orang Kutai. Struktur ide (ritual) menekankan berbagai peristiwa mitis, tentang dimensi suprastruktur, memposisikan Sultan sebagai sosok pemimpin-kerajaan Kutai Kartanegara yang demikian penting, dengan berbagai peranan istimewa, menyebabkan *Erau* menjadi sebuah ritual politik.

Sebagai pemimpin kerajaan, Sultan atau raja diyakini mampu memberi perlindungan dan rasa aman serta kesejahteraan kepada rakyatnya. Hal ini diyakini karena Sultan adalah titisan dewa yang memiliki kemampuan supranatural, mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan rakyat biasa. Bahkan Sultan atau raja diyakini, bahwa hanya dialah yang dapat menerjemahkan amanah untuk memimpin rakyat di kerajaan Kutai Kartanegara. Keyakinan ini menyebabkan, birokrasi konsultan harus didukung dalam upaya menciptakan suatu tatanan *Ruhui Rahayu* bagi rakyat kerajaan Kutai Kartanegara. Hal ini dapat dilihat pada prosesi *Erau* yang merefleksikan makna-makna simbolik kejayaan Sultan Kutai.

Keyakinan yang kuat berkenaan dengan struktur ide tersebut, dapat dipahami karena adanya pengaruh mistis yang demikian besar sehingga mampu membangun sekat-sekat dalam strata sosial yang membatasi hubungan antar rakyat dengan raja dalam status dan peran yang berbeda-beda. Disini kemudian muncul simbolisme ritual sebagai refleksi struktur sosial.

Erau sebagai wahana dalam menerjemahkan ideologi *ruhui rahayu*, sebenarnya digunakan untuk menunjukkan bagaimana teks-teks dan praktik-praktik

budaya menghadirkan citra tentang realitas yang mengalami distorsi untuk kepentingan strata masyarakat tertentu. Muncul kemudian anggapan, bahwa ideologi *ruhui rahayu* bukan hanya pelembagaan ide-ide, tetapi juga sebagai suatu praktik penguasaan sumberdaya. Dalam hai ini, *Erau* sebagai peristiwa budaya, menjadi wahana untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan politik Sultan dalam memimpin kerajaan Kutai Kartanegara dalam hai ini *Erau* menjadi instrumen kekuasaan.

Kekuasaan politik raja kemudian mengalami guncangan hebat dengan tumbuhnya kesadaran politik rakyat pada dekade awal masa kemerdekaan. Bahkan kemudian raja mengalami krisis kepercayaan, ketika raja dianggap tidak mampu memberi perlindungan dan rasa aman serta kesejahteraan kepada rakyat Kutai Kartanegara, akibat gaya hidup bangsawan keraton yang masih saja bermewah-mewah saat mana rakyat menderita akibat penjajahan Belanda maupun Jepang. Tumbuhnya kesadaran politik rakyat disertai krisis kepercayaan itulah, menjadi pemicu runtuhnya sistem pemerintahan kerajaan Kutai Kartanegara.

*Setelah mengalami kevakuman selama lebih satu dasawarsa, pada tahun 1971, *Erau* kembali diselenggarakan sebagai upaya pelestarian budaya leluhur.* Bahkan penyelenggaraan *Erau* yang lebih meriah terjadi pada Era Otonomi Daerah tahun 2001. Pada penyelenggaraan *Erau* kali ini, roh kesultanan Kutai seolah hidup kembali, bersamaan dengan dinobatkannya Aji Muhammad Salehuddin II sebagai Sultan Kutai Kartanegara dan pemberian gelar Bupati Kutai Kartanegara Syaukani HR dan istrinya oleh Sultan Kutai. Namun demikian, *Erau* pada masa Otonomi Daerah telah mengalami transformasi simbolik. *Sultan*, bukan lagi seorang penguasa, sebagaimana pada masa kerajaan dahulu, melainkan sebuah simbol yang diharapkan mampu menjaga keluhuran nilai-nilai budaya orang Kutai.

Pada era otonomi daerah itu pula, relasi *Erau* sebagai peristiwa budaya dengan kekuasaan elit birokrasi tampak demikian kental. Melalui *Erau* wacana politik kebudayaan dan dekonstruksi identitas orang Kutai terbangun kembali. Hal ini juga dapat dilihat pada fungsi *Erau* yang telah mengalami komodifikasi bagi kepentingan pariwisata daerah. Identitas orang Kutai seolah dipertaruhkan, Hal ini kemudian menyebabkan perlunya pembangunan keraton baru bagi Sultan Kutai dan berbagai simbol-simbol modernisasi lainnya yang mampu merefleksikan identitas orang Kutai saat ini sebagai masyarakat modern yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker Chris, 2005. *Cultural Studies Teori dan Praktek.* Yogyakarta: Bentang,.
- Burke Peter. 2003, *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.,
- Claessen, H.J.M, 1987. *Antropologi Politik Suatu Orientasi.* Jakarta : Penerbit Erlangga.,
- Diane J . Austin-Bross (Ed.)1987. *Creating Culture*, Australia : Allen & Unwin Pry Lt.
- _____, 2002. *Sakral dan Profan Mengungkap Hakikat Agama*, Yogyakarta. : Fajar Pustaka Baru,
- _____, 2000. *Negara Teater Kerajaan-Kerajaan BaliAbad Kesembilan Belas*,, Yogyakarta Bentang
- Giddens Anthony, 2003, *Masyarakat Post-Tradisional* Yogyakarta:. IRCISOD),
- Laksono, P.M., 1985. *Tradisi Dalam Struktur Masyarakat Jawa Kerajaan dan Pedesaan Alih-Ubah Model Berfikir Jawa*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.,
- Maunati Yekti, 2004. *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta : LKis,
- Shore Chris and Wright S, 1997. *Anthropology of Policy Critical Perspektives on Governance and Power*. London-New York.
- Soetoen, Anwar. 199. *Kutai Perbendaharaan Kebudayaan Kalimantan Timur*, Pemda Kabupaten Kutai Kaltim.
- Spradley P. James., 1979. *The Etnographic*, Holt Rinehart and Winston, New York - San Fransisco.
- Storey John, 2003. *Teori Bttdaya dan Budaya Pop Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*, Kalam, Yogyakara.
- Syahbandi, 1996. *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli di Kalimantan Timur*, Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kaltim.
- Yuwanto, 2003. Dinamika Politik Lokal, dalam *Otonomi Daerah Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal*, Puskodak Undip, Semarang.